



## Checklist Persyaratan Izin Lingkungan – Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kelas B

<b>Kewenangan</b>	UP PMPTSP Kota
<b>Pengertian</b>	Dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
<b>Dasar Hukum</b>	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM11/12/2016
<b>Diajukan Melalui Web</b>	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Izin Lingkungan – Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kelas B secara elektronik melalui <i>jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	<b>Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)</li> <li>WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor</li> </ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	<b>Jika Usaha Perorangan (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP Perorangan</li> </ul> <b>Jika Badan Usaha (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)</li> <li>SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham</li> <li>NPWP Badan Usaha</li> </ul>		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Scan Asli Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan)		
7	Ikhtisar tanah yang menggambarkan dalam peta, jika jumlah surat tanah lebih dari 3 (tiga); Kajian Manajemen Rekayasa Lalu lintas (KMRL) atau Amdal Lalin;		
	Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; (untuk kegiatan non Pemerintah).		
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jika bangunan atau gedung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Scan Asli izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) jika luas lahan lebih dari 5000 m<sup>2</sup></li> <li>Scan Asli Ketetapan Rencana Kota (KRK)</li> <li>Gambar bangunan yang telah terbangun (As Built Drawing) disertai kajian perhitungan intensitas yang ditandatangani oleh pemegang IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) atau RTLB/Gambar Perencanaan Arsitektur yang disahkan;</li> </ul> </li> <li>Jika jalur atau utilitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Scan Asli Izin Trace</li> </ul> </li> <li>Jika kegiatan reklamasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Scan Asli Izin Prinsip Reklamasi dari Gubernur</li> <li>Gambar bangunan yang telah terbangun (As Built Drawing) disertai kajian perhitungan intensitas yang ditandatangani oleh pemegang IPTB (Izin Pelaku Teknis Bangunan) atau RTLB/Gambar Perencanaan Arsitektur yang disahkan;</li> </ul> </li> </ul>		
9	MOU jika ada kerjasama oleh pihak kedua atau ketiga		
10	Surat penunjukan konsultan atau surat penunjukan penyusun dokumen dari pemrakarsa		
11	Tim penyusun dokumen atau konsultan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar riwayat hidup penyusun studi UKL-UPL 3 (tiga) tahun terakhir</li> <li>Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari seluruh anggota tim yang menyatakan terlibat dalam penyusunan dokumen</li> <li>Scan Asli Sertifikat registrasi konsultan perusahaan penyusun dokumen lingkungan</li> </ul>		
12	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen DPLH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan / atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan kata pengantar yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Kegiatan dan stempel;Peta titik lokasi (Gunther &amp; Google Maps) dilengkapi dengan koordinat lokasi kegiatan</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto situasi satu minggu terakhir di lokasi kegiatan;</li> <li>• Hasil analisa laboratorium terakreditasi dan teregistrasi;</li> <li>• Peta titik lokasi (Gunther &amp; google maps) dilengkapi dengan koordinat lokasi kegiatan;</li> </ul>		
---	--	--

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala UP PMPTSP			
7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
23 Hari Kerja	Rp.0	-

**Catatan**

---



---

*Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*